

**Tahapan Capaian Realisasi Tujuan/Sasaran
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	
1.	Tujuan : Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang mendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Indeks Infrastruktur PU	Nilai komposit (angka Indeks gabungan) rata-rata tertimbang yang mengukur tingkat kemandirian, ketersediaan, dan fungsionalitas pelayanan infrastruktur dasar urusan Pekerjaan Umum yang meliputi sektor Bina Marga (Jalan dan Jembatan), Sumber Daya Air (Irigasi), dan Cipta Karya/SDA (Sistem Drainase Perkotaan). Indeks ini merefleksikan sejauh mana intervensi pembangunan fisik yang dilakukan Dinas PU mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas aset infrastruktur daerah guna melayani aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.	Indeks	60	1	0	0	100%	Penjelasan Penetapan target : Pada Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, dihitung berbasis pada 3 pilar (Konektivitas, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya), sehingga pada triwulan awal belum menghasilkan nilai capaian. Analisisnya difokuskan pada tahapan proses dan kesiapan data. Pekerjaan fisik seperti peningkatan jalan, irigasi, jembatan, sanitasi, dan gedung membutuhkan waktu: pengerjaan yang panjang dan biasanya baru selesai 100% (serah terima fisik) di akhir tahun. Faktor Penghambat Triwulan 1 : 1. Pembuatan Detailed Engineering Design (DED) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek jalan atau irigasi baru dimulai di TW 1, yang menyita waktu sebelum masuk tahap lelang. 2. Proses asistensi dan pencairan DPA di awal tahun sering kali membutuhkan waktu, sehingga anggaran belum bisa langsung digunakan untuk eksekusi program. 3. Proses penerbitan SK Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di internal dinas sering kali mengalami keterlambatan. Faktor Pendorong : 1. Adanya dukungan koordinasi yang baik dari instansi vertikal, Forum Penataan Ruang, serta pelibatan aktif jajaran Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam sosialisasi proyek, sehingga meminimalisir konflik sosial di lapangan. 2. Penetapan SK Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK, PPTK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tepat waktu di awal tahun, memberikan kepastian hukum bagi jalannya tahapan perencanaan teknis (DED). 3. Kerja sama lintas sektor dan antar-kabupaten/kota dalam menghubungkan jaringan jalan dengan pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri/wisata). Rencana Perbaikan Triwulan 2: 1. Mempercepat penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) agar penyedia jasa dapat segera melakukan mobilisasi alat dan bahan ke lapangan. 2. Mengoptimalkan peran PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan dalam memonitor progres mingguan untuk mengantisipasi keterlambatan diri (Show Cause Meeting jika terjadi keterlambatan progres). 3. Menerapkan sistem pemantauan kondisi aset jalan dan jembatan secara real-time untuk memprioritaskan perbaikan pada titik yang rusak parah.	
						2	0		0%		
						3	0		0%		
						4	50		0%		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinarmagaan dan SDA Pendukung Pengembangan Ekonomi dan Wilayah	Indeks Kinerja Infrastruktur SDA	Indeks Kinerja Infrastruktur SDA adalah ukuran tingkat kondisi, fungsi, dan kinerja infrastruktur sumber daya air (SDA) yang meliputi jaringan irigasi, drainase, pengendali banjir, embung, bangunan air, dan prasarana SDA lainnya dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, ketahanan wilayah, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.	Indeks	60	1	0	0	100%	Penjelasan : Penempatan target pada Triwulan 4, karena Penghitungan Indeks Kinerja Infrastruktur SDA bersifat tahunan sehingga pada TW 1 belum tersedia data lengkap untuk perhitungan Indeks. Faktor penghambat Triwulan 1 : 1. Proses penyusunan dan revisi Dokumen Perencanaan (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket fisik SDA (seperti normalisasi sungai, penguatan tebing, atau peningkatan jaringan irigasi) membutuhkan ketelitian ekstra terkait perhitungan hidrolika agar bangunan tidak runtuh saat banjir. Hal ini memakan waktu di awal tahun anggaran. 2. Triwulan I biasanya bertepatan dengan puncak musim penghujan, sehingga debit air sungai dan jaringan irigasi masih sangat tinggi. Kondisi ini menyulitkan Tim Teknis untuk melakukan survei detail lapangan (Field Design) secara akurat untuk menyusun DED (Detail Engineering Design). Rencana Perbaikan Triwulan 2: 1. Pengajuan program Inpres no 2 tahun 2025 tahun anggaran 2026. 2. Mitigasi penanganan pengelolaan air untuk irigasi, penanganan darurat pengamanan bangunan irigasi.	KEPALA BIDANG BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN DAI AGUS MUTTAQIN, ST, M.T. NIP. 197407182006041013 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI MADONA MALIK KUMBARA, S.T. NIP. 198609242010011007
						2	0		0%		
						3	0		0%		
						4	50		0%		
		Indeks Infrastruktur Drainase	Indeks ini menggambarkan tingkat kualitas infrastruktur drainase berdasarkan aspek kondisi fisik, kapasitas layanan, konektivitas jaringan, operasional dan pemeliharaan, serta kemampuan sistem drainase dalam mengendalikan genangan.	Indeks	8,53	1	0	0	100%	Penjelasan : Penempatan target pada Triwulan 4, karena Penghitungan Pengukuran Indeks Infrastruktur Drainase bersifat tahunan sehingga pada TW 1 belum tersedia data komprehensif untuk perhitungan Indeks. Faktor penghambat : 1. Triwulan I merupakan fase krusial untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED/Detail Engineering Design), penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Fisik konstruksi belum bisa berjalan sebelum kontrak dengan penyedia jasa ditandatangani. Proses antrean revisi dokumen persiapan tender di tingkat UKPB (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) kabupaten memerlukan waktu linear sesuai regulasi pengadaan. Rencana Perbaikan Triwulan 2: Mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelesaian Lingkungan/Drainase untuk segera menyelesaikan revisi hasil tender bersama Pokja Pemilihan agar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dapat diterbitkan di awal bulan pertama Triwulan II.	KEPALA BIDANG KONSTRUKSI DAN TATA RUANG ARIEF RACHMAN NUYA, S.T. NIP. 198206162010011016
						2	0		0%		
						3	0		0%		
						4	8,53		0%		
		Indeks Infrastruktur Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan adalah ukuran tingkat kondisi, kemandirian, dan fungsi pelayanan jaringan jalan yang menjadi kewenangan daerah dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan ekonomi wilayah.	Indeks	80	1	0	0	100%	Penjelasan : Penempatan target pada Triwulan 4, karena Penghitungan Pengukuran Indeks Infrastruktur Jalan bersifat tahunan sehingga pada TW 1 belum tersedia data komprehensif untuk perhitungan Indeks. Faktor penghambat Triwulan 1: 1. Triwulan I merupakan masa penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engineering Design/DED) jalan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan survei harga material/terbaru, serta input Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kontrak fisik belum terbentuk, sehingga progres lapangan masih 0%. 2. Kondisi kerusakan jalan pasca-musim hujan seringkali berubah (bertambah parah) dibanding saat pendataan tahun lalu. Oleh karena itu, diperlukan waktu di Triwulan I untuk melakukan survei kaji ulang lapangan (Field Engineering) agar volume kontrak yang dilampirkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Rencana Perbaikan Triwulan 2: 1. Mengawal ketat proses revisi lelang bersama Pokja UKPB agar penandatanganan kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dapat diselesaikan pada bulan pertama Triwulan II. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan (Time Schedule/Kurva S) bersama penyedia jasa dengan memprioritaskan pekerjaan galian, saluran samping jalan, dan struktur tanah di awal Triwulan II, sehingga pengerjaan pengaspalan utama (overlay) dapat dilakukan pada kondisi cuaca yang lebih kering/stabil.	KEPALA BIDANG JALAN ARIF PUGUH PRASETYO, S.T. NIP. 198012302010011013 KEPALA BIDANG JEMBATAN KHURNIA WIDYASTUTI, S.T., M.Si NIP. 197803132006042031
						2	0		0%		
						3	0		0%		
						4	80		0%		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman dan Bangunan Gedung yang Tertata	Indeks Bangunan Gedung	Nilai komposit (angka Indeks) yang mengukur tingkat pemenuhan keandalan fisik, kepatuhan administrasi, dan keteraturan penyelenggaraan bangunan gedung di suatu wilayah kerja sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Indeks ini merefleksikan persentase atau rasio bangunan gedung yang telah memenuhi aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan, serta tertib perizinan (seperti kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung/PBG dan Sertifikat Laik Fungsi/SLF).	Indeks	27,5	1	0	0	0	100%	Penjelasan Penetapan target : Target Indeks Bangunan Gedung ditempatkan di Triwulan 4 karena pembangunannya memiliki kompleksitas struktur yang tinggi dan serah terima fisik baru rampung di akhir tahun. Selain itu, indeks ini tidak hanya mengukur selesainya bangunan, tetapi juga legalitas keandalannya seperti dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Oleh karena itu, akumulasi data bangunan yang memenuhi standar kelayakan baru bisa diverifikasi dan dihitung secara utuh pada triwulan keempat. Faktor Penghambat Triwulan 1 : 1. Triwulan I merupakan masa krusial penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engineering Design/DED) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket fisik rehabilitasi gedung negara/fasilitas publik. 2. Pendaftaran dan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) wajib melalui aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Di awal tahun, sering kali terjadi kendala teknis pada sistem atau keterlambatan verifikasi dokumen oleh Tim Profesi Ahli (TPA) yang baru dibentuk kembali untuk tahun anggaran berjalan. Rencana Perbaikan Triwulan 2 : 1. Memastikan seluruh dokumen teknis (Detailed Engineering Design/DED, Rencana Kerja dan Syarat-syarat/RKS, dan HPS) selesai 100% di awal TW 2 agar paket pekerjaan gedung negara bisa segera ditayangkan di LPSE. 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mempercepat proses sidang teknis dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di aplikasi SIMBG.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA RATNA SARIWULAN, ST, M.T. NIP. 197408302009012003
					2	0	0	0	100%		
					3	0	0	0	100%		
					4	27,5	0	0	0%		
	Indeks Air Minum	Nilai komposit (angka Indeks) yang merepresentasikan tingkat pemenuhan, keterlaksanaan, dan kualitas pemanfaatan air minum oleh rumah tangga di suatu wilayah berdasarkan standar 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) serta perluasan jaringan distribusi layanan (baik melalui Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM Jaringan Perpipaan maupun Non-Jaringan Perpipaan terdistribusi). Indeks ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengonversi pembangunan fisik (pemasangan Sambungan Rumah/SR, pembangunan IPA, optimalisasi reservoir) menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam pemenuhan air bersih.	Indeks	100	1	0	0	0	100%	Penjelasan Penetapan target : Target Indeks Air Minum ditempatkan di Triwulan 4 karena Infrastruktur air bersih memerlukan waktu panjang untuk membangun unit produksi hulu sekaligus menanam jaringan pipa distribusi ke hulu. Selain itu, Indeks ini baru bisa dihitung jika air sudah benar-benar mengalir ke rumah warga (fungsional) setelah melalui uji coba kelayakan (commissioning test). Oleh karena itu, rekapitulasi data sambungan rumah baru dan konsolidasi data bersama PDAM baru bisa diverifikasi secara utuh sebagai capaian akhir di triwulan keempat. Faktor penghambat : 1. Triwulan I merupakan masa penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engineering Design/DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proyek perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) maupun Jaringan Distribusi Pembagi. Belum ada pengerjaan fisik pemasangan pipa di lapangan sebelum proses tender selesai, sehingga progres fisik masih 0%. 2. Untuk paket sarana air minum berbasis masyarakat (seperti perluasan SPAM pedesaan), proses verifikasi kesiapan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) atau Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) seringkali membutuhkan waktu penyesuaian di awal tahun, khususnya dalam pemenuhan dokumen proposal teknis. 3. Pengukuran Indeks Air Minum bersifat tahunan sehingga pada TW I belum tersedia data komprehensif untuk perhitungan indeks. Faktor Pendorong : 1. Adanya data koordinat yang valid mengenai desa lokus stunting dan kawasan rawan air bersih dari Bappeda/Dinas Kesehatan, memudahkan Bidang Cipta Karya dalam menentukan titik prioritas pembangunan Sambungan Rumah (SR) baru secara presisi sejak awal tahun. 2. Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden (Inpres) terkait Air Minum yang terbit lebih awal memberikan kepastian pagu anggaran, sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak mengalami revisi berulang. Rencana Perbaikan : 1. Mengawal ketat proses reviu hasil tender bersama Pokja UKPRU agar penandatanganan kontrak untuk pengadaan pipa dan aksesorisnya dapat rampung pada bulan pertama Triwulan II. 2. Melakukan pendampingan intensif kepada KKM/KP-SPAMS di wilayah pedesaan agar pencairan dana hibah masyarakat atau penyediaan lahan untuk reservoir atas (ground tank) selesai sebelum masa konstruksi dimulai pada Triwulan II.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA RATNA SARIWULAN, ST, M.T. NIP. 197408302009012003
					2	0	0	0	100%		
					3	0	0	0	100%		
					4	100	0	0	0%		
	Indeks Sanitasi	Nilai komposit (angka Indeks) yang merepresentasikan tingkat pemenuhan, keterlaksanaan, dan kualitas pengelolaan prasarana sanitasi di suatu wilayah yang mencakup 2 (dua) sub-urusan utama, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik (skala komunal maupun domestik/tersempit) dan Sistem Pengelolaan Persampahan (pengurangan dan penanganan sampah). Indeks ini mengukur efektivitas intervensi penganggaran Dinas PU dalam mengubah kondisi lingkungan dari berisiko sanitasi (seperti adanya perilaku Buang Air Besar Sembarangan/BABS atau penumpukan sampah liar) menjadi kawasan yang memiliki akses sanitasi layak dan aman.	Indeks	89	1	0	0	0	100%	Penjelasan Penetapan target : Target Indeks Sanitasi ditempatkan di Triwulan 4 karena pembangunan jaringan pipa limbah di permukiman padat memerlukan waktu pengerjaan yang panjang serta melibatkan masyarakat yang intensif. Selain itu, Indeks ini baru bisa dihitung jika sarana sanitasi sudah fungsional (terhubung ke toilet warga) dan telah melalui uji coba sistem pengolahan limbah. Oleh karena itu, rekapitulasi data cakupan layanan sanitasi yang layak dan aman baru bisa diverifikasi secara utuh sebagai capaian akhir pada triwulan keempat. Faktor Penghambat : 1. Pengukuran Indeks Bangunan Gedung bersifat tahunan sehingga pada TW I belum tersedia data komprehensif untuk perhitungan indeks. 2. Triwulan I merupakan masa penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engineering Design/DED) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket fisik seperti pembangunan IPAL Komunal, Tangki Septik Pabrikasi, maupun gedung TPS 3R. Progres fisik di lapangan masih 50% karena belum ada penandatanganan kontrak kontrak kerja. 3. Curah hujan yang tinggi pada awal tahun menyebabkan naiknya volume air permukaan dan tingginya muka air tanah. Kondisi ini menyulitkan Tim Teknis dalam melakukan survei lapangan, pengujian daya serap tanah (percolation test), serta menentukan kedalaman galian yang aman untuk tangki septik agar tidak mudah ambias atau longsor. Faktor Pendorong : 1. Tersedianya data Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBKDI) serta data kawasan kumuh yang valid dari Bapperida, memudahkan dinas dalam menentukan prioritas lokasi (deliniasi) intervensi program sanitasi secara presisi sejak awal tahun. 2. Rekrutmen dan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bidang sanitasi yang dilakukan lebih awal, sehingga proses pendampingan masyarakat dan penyusunan dokumen RKM di tingkat desa tidak mengalami keterlambatan. 3. Adanya petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi atau Inpres Sanitasi yang terbit tepat waktu memberikan kepastian baku terkait standar teknis bangunan baku (misal: kewajiban tangki septik kedap air standar SNI). Rencana Perbaikan : 1. Mengawal proses reviu hasil tender bersama Pokja UKPRU agar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit di awal Triwulan II. Untuk tangki septik individual, diarahkan menggunakan sistem E-Purchasing (E-Katalog) untuk komponen tangki fiberglass pabrikasi guna mempercepat distribusi logistik ke lapangan. 2. Memastikan seluruh dokumen hibah lahan atau surat pernyataan kerelaaan tempat untuk bangunan IPAL Komunal atau TPS 3R dari warga telah ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Desa pada bulan pertama Triwulan II sebelum konstruksi dimulai. 3. Mengingat keterlambatan di Triwulan I, pada Triwulan II penyedia jasa atau KSM didorong menggunakan komponen precast (beton pracetak) untuk dinding bak kontrol atau dinding lubang resapan guna menghemat waktu pengerjaan sipil di lokasi padat penduduk.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA RATNA SARIWULAN, ST, M.T. NIP. 197408302009012003
					2	0	0	0	100%		
					3	0	0	0	100%		
					4	89	0	0	0%		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan Per Triwulan	Paraf Koordinasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = 9/8*100%	(11)	
	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penataan Ruang	Indeks Kualitas Penataan Ruang	Nilai Indeks yang diadopsi dari standar Kementerian ATR/BPN untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang. IKPR memiliki 3 (tiga) pilar utama penyelenggaraan tata ruang secara holistik, yaitu: 1. Seberapa berkualitas dokumen rencana tata ruang yang dimiliki daerah (Kualitas Rencana Tata Ruang). 2. Seberapa taat pelaksanaan pembangunan di lapangan terhadap rencana tersebut (Kesesuaian Pemanfaatan Ruang). 3. Seberapa tertib penegakan aturan dan insentif/disinsentif yang diterapkan (Kepatuhan Pemanfaatan Ruang).	Indeks	7	1	0	0	0%	Penjelasan Penetapan target : Target Indeks Kualitas Penataan Ruang ditempatkan di Triwulan 4 karena proses legislasi dokumen rencana tata ruang (seperti Perkada RDTR) memerlukan tahapan birokrasi, sidang pleno, dan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN yang memakan waktu sepanjang tahun. Selain itu, evaluasi terhadap kepatuhan pemanfaatan ruang serta audit perizinan di lapangan hanya bisa dihitung secara akurat setelah merekap seluruh aktivitas pembangunan selama satu tahun penuh. Oleh karena itu, konsolidasi bukti dukung dan validasi akhir nilai indeks baru dapat diselesaikan secara utuh pada triwulan keempat. Faktor Penghambat : 1. Proses tumpang susun (overlay) data tutupan lahan eksisting dengan rencana pola ruang sering terhambat oleh ketersediaan citra satelit terbaru atau data peta dasar yang belum diperbarui (misal: perubahan kawasan LP2B atau kawasan lindung yang belum tersinkronisasi dalam database dinas). 2. Pengukuran Indeks Bangunan Gedung bersifat tahunan sehingga pada TW I belum tersedia data komprehensif untuk perhitungan indeks. 3. Proses verifikasi pemanfaatan ruang memerlukan keahlian khusus dalam sistem GIS (Geographic Information System) dan pembacaan peta zonasi. Pergantian personel atau PA di awal tahun sering kali menyebabkan jeda pada penggunaan sistem (seperti GISARU atau SIMBG) bagi pejabat yang baru menjabat. Faktor Pendorong : 1. Forum Penataan Ruang yang aktif mengadakan rapat koordinasi di awal tahun sangat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan untuk permohonan pemanfaatan ruang skala strategis yang memerlukan rekomendasi teknis. 2. Adanya instruksi dan perhatian khusus dari pusat (DAK Non Fisik Penataan Ruang) yang mengharuskan setiap daerah memiliki dokumen RDTR yang terintegrasi, memuat dinas untuk lebih disiplin dalam pelaporan dan pemenuhan dokumen tata ruang di awal tahun. Rencana Perbaikan : 1. Menjadwalkan pelatihan singkat atau refreshment teknis bagi staf fungsional tata ruang mengenai penggunaan perangkat lunak GIS terbaru agar analisis perubahan tutupan lahan (overlay peta) dapat dikerjakan secara mandiri di kantor tanpa harus menunggu bantuan konsultan luar. 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	KEPALA BIDANG KONSTRUKSI DAN TATA RUANG ARIEF RACHMAN NUYA, S.T. NIP. 198206162010011016
						2	0	0	100%		
						3	0	0	100%		
						4	7	0	0%		
	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Nilai Indeks (angka representatif) yang mengukur tingkat kepatuhan dan keselarasan antara pemanfaatan ruang eksisting/faktual di lapangan (serta seluruh dokumen izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan) terhadap rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW atau Peraturan Bupati tentang RDTR. Indeks ini menunjukkan sejauh mana Dinas PUPR mampu mengendalikan laju pembangunan daerah agar tetap berada pada koridor zonasi yang benar, guna mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan dampak negatif lingkungan.	Indeks	94	1	0	0	100%	Faktor Penghambat : 1. Sering terjadi kendala teknis pada integrasi data antara sistem OSS RBA (Pusat) dengan data database zonasi daerah. Hal ini menyebabkan permohonan KKPR tertahan dalam status "Antrean Verifikasi" karena sistem perlu sinkronisasi ulang setelah pergantian tahun. 2. Proses pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Teknis atau anggota Forum Penataan Ruang (FPR) di awal tahun sering memakan waktu. Tanpa tim teknis yang sah secara administratif, sidang verifikasi permohonan KKPR tidak dapat dilaksanakan, sehingga perizinan "macet" di bulan Januari dan Februari. Faktor Pendorong : 1. Ketersediaan data zonasi dalam format shapefile yang sudah terunggah ke sistem GISARU mempercepat proses self-assessment awal oleh pemohon, sehingga mengurangi beban verifikasi dokumen fisik di kantor. 2. Adanya jadwal rutin sidang Forum Penataan Ruang (FPR) yang sudah disusun sejak awal tahun memungkinkan permohonan yang masuk di Triwulan I segera diproses sesuai jadwal, meskipun volume permohonan masih rendah. Rencana Perbaikan : 1. Menginstruksikan tim teknis untuk melakukan verifikasi administratif secara paralel (bersamaan) dengan pengecekan GIS untuk mempercepat pengolahan permohonan KKPR yang masuk secara masif di awal Triwulan II. 2. Mengadakan sosialisasi rutin mengenai prosedur pemanfaatan ruang sesuai RDTR bagi pelaku usaha, agar dokumen teknis yang mereka ajukan sejak awal sudah lengkap dan sesuai, sehingga tidak banyak permohonan yang ditolak atau dikembalikan (re-submit).	KEPALA BIDANG KONSTRUKSI DAN TATA RUANG ARIEF RACHMAN NUYA, S.T. NIP. 198206162010011016
						2	0	0	100%		
						3	0	0	100%		
						4	94	0	0%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	88,57	1	0	0	100%	Penjelasan lainnya : Penetapan target nilai SAKIP di Tw 3 dikarenakan penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat dilaksanakan 1 tahun sekali di Tw 3 atau 4 Faktor Penghambat : 1. Penilaian SAKIP dilakukan secara tahunan sehingga pada TW I belum tersedia hasil evaluasi kinerja. 2. Penyusunan dan penyempurnaan dokumen kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKIP) masih dalam tahap awal. 3. Implementasi cascading kinerja dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, serta pelaporan belum sepenuhnya optimal. 4. Keterbatasan pemahaman SDM terhadap penyusunan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil. Faktor Pendorong : 1. Tersedianya regulasi dan pedoman penyelenggaraan SAKIP sebagai acuan. 2. Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. 3. Dukungan Inspektorat atau tim pembina dalam pembinaan dan evaluasi SAKIP. 4. Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kinerja. Rencana Perbaikan : 1. Melakukan penyempurnaan dokumen kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, dan indikator kinerja) agar lebih terukur dan selaras. 2. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan cascading kinerja dan keterkaitan dengan penganggaran. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis atau pendampingan penyusunan SAKIP.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ARIF LIYANTONO, ST NIP. 197804252006041010
						2	0	0	100%		
						3	88,57	0	0%		
						4	88,57	0	0%		

